



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Senin, 11 April 2016
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 14.00 WIB s.d 17.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Membahas insiden/kecelakaan penerbangan di Indonesia; 2. membicarakan permasalahan transportasi darat berbasis aplikasi online
Ketua Rapat	: Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota	: dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Perhubungan beserta jajaran terkait.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 14.00 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan pada hari ini adalah membahas insiden/kecelakaan penerbangan di Indonesia dan membicarakan permasalahan transportasi darat berbasis aplikasi *online*.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perhubungan untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI merasa prihatin atas insiden pesawat Batik Air dan TransNusa di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Senin 4 April 2016, di tengah upaya Indonesia untuk dapat masuk ke dalam kategori 1 FAA.
2. Komisi V DPR RI merekomendasikan Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan kembali evaluasi dan kajian yang lebih komprehensif mengenai pemanfaatan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma untuk penerbangan sipil, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.
3. Komisi V DPR RI mendesak KNKT untuk bergerak cepat memberikan rekomendasi yang komprehensif dan solutif agar dapat mengurangi dan meminimalisir insiden dan *accident*. Selanjutnya, Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk melaksanakan seluruh rekomendasi KNKT dan juga rekomendasi Panja Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan Nasional Komisi V DPR RI.
4. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan, LPPNPI dan seluruh *stakeholders* terkait untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana kebandarudaraan, dan manajemen pengelolaan bandar udara dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan nasional.
5. Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk menciptakan iklim industri jasa angkutan umum yang kondusif, mendorong persaingan sehat, memenuhi standar pelayanan minimal, memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan Kendaraan Bermotor Umum, senantiasa memprioritaskan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.20 WIB.

Jakarta, 11 April 2016

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

IGNASIUS JONAN

KETUA RAPAT,

ttd

FARY DJEMY FRANCIS